

Judul : Stunting di NTT tinggi, puskesmas minim tenaga kesehatan
Tanggal : Kamis, 14 Agustus 2025
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Stunting Di NTT Tinggi

Puskesmas Minim Tenaga Kesehatan

PROVINSI Nusa Tenggara Timur (NTT) masih menempati peringkat pertama angka *stunting* di Indonesia. Pemerintah diminta memberi perhatian serius terhadap masalah ini dengan melibatkan kolaborasi lintas sektor agar penanganannya efektif.

Anggota Komisi IX DPR Cellica Nurrachadiana mengungkapkan sejumlah faktor penyebab tingginya angka stunting. Salah satunya, ketidaktersediaan vaksin bagi bayi baru lahir. Masalah ini akan dibahas bersama Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

"Agar pemerataan layanan kesehatan, termasuk ketersediaan obat, sarana prasarana, SDM, digitalisasi, dan vaksin, dapat terealisasi hingga ke daerah terpencil seperti NTT," ujarnya usai kunjungan reses ke NTT, Selasa (12/8/2025).

Selain itu, ketersediaan tenaga kesehatan (*nakes*) juga masih rendah. Saat ini, SDM *nakes* di NTT baru mencapai 29 persen, sehingga 71 persen Puskesmas masih kekurangan tenaga medis. Kondisi ini menjadi tantangan dalam menjalankan program pemeriksaan kesehatan gratis.

Cellica juga menyoroti tingginya jumlah pekerja migran perempuan lulusan SD asal NTT yang bekerja di luar negeri, berdampak pada pola asuh anak dan menjadi salah satu faktor penyebab stunting.

"Kami mendorong pendataan akurat dan intervensi berbasis data untuk mengatasi persoalan tersebut," tegasnya.

Anggota Komisi IX DPR Netty Prasetyani menambahkan, Posyandu di NTT memiliki peran strategis dalam pencegahan stunting. Namun, perlu dukungan kebijakan untuk meningkatkan kapasitas kader Posyandu.

"Kader Posyandu sudah terlatih, punya jiwa sukarela dan semangat pengorbanan. Tapi ini harus bertemu dengan kebijakan yang tepat agar kapasitas mereka meningkat," ujarnya.

Netty bilang, ketersediaan infrastruktur dan peralatan Posyandu masih minim. Bahkan di Pulau Jawa saja, banyak Posyandu yang harus meminjam alat antropometri dari puskesmas.

"Bisa dibayangkan, di NTT yang terdiri dari ratusan pulau, pembuktian dan akses sulit, tan-



Cellica Nurrachadiana

tangannya tentu jauh lebih berat," jelasnya.

Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris menegaskan, pihaknya akan menyampaikan berbagai persoalan di NTT kepada kementerian atau lembaga mitra. Masalah ini sangat krusial untuk diselesaikan, karena masalah stunting di NTT yang mencapai 27,9 persen.

"Kami akan bekerja keras dengan mitra-mitra untuk menghadirkan berbagai program dan anggaran yang dibutuhkan," ujarnya.

Politikus PDI-Perjuangan itu menjelaskan, walaupun saat ini efisiensi berlangsung, pelayanan dasar masyarakat tidak boleh terganggu. Termasuk pemenuhan kebutuhan dasar dari sisi

kesehatan dan lainnya.

"Seluruh masukan yang kami dapatkan tentu akan jadi bahan rapat dengan mitra kami di DPR, baik itu Kemenkes dan kementerian lainnya," ucapnya.

Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena menyatakan, Pemprov NTT telah menaungkan program Posyandu Tangguh sebagai ujung tombak percepatan penanganan stunting.

"Posyandu menjadi pos komando utama dalam penanganan gizi, deteksi dini, edukasi, dan promosi gaya hidup sehat di tingkat komunitas," jelasnya.

Selain itu, Pemprov juga meluncurkan program Perlindungan Jamsostek bagi 100 ribu pekerja miskin, miskin ekstrem, dan pekerja rentan, yang didanai APBD sejak 21 Juli 2025.

Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas Kemenkes Maria Endang Sumiwi memaparkan, NTT menjadi provinsi dengan prevalensi balita stunting tertinggi sebesar 37,9 persen pada 2023 dan 37,0 persen pada 2024. NTT masuk dalam enam besar provinsi yang menyumbang 50 persen kasus stunting di Indonesia. ■ PVB